

DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :
Adriyana Sinta Devi
NIM : 31402300195

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2025

DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :
Adriyana Sinta Devi
NIM : 31402300195

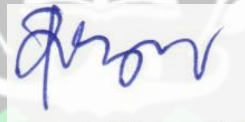
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2025

SKRIPSI
DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

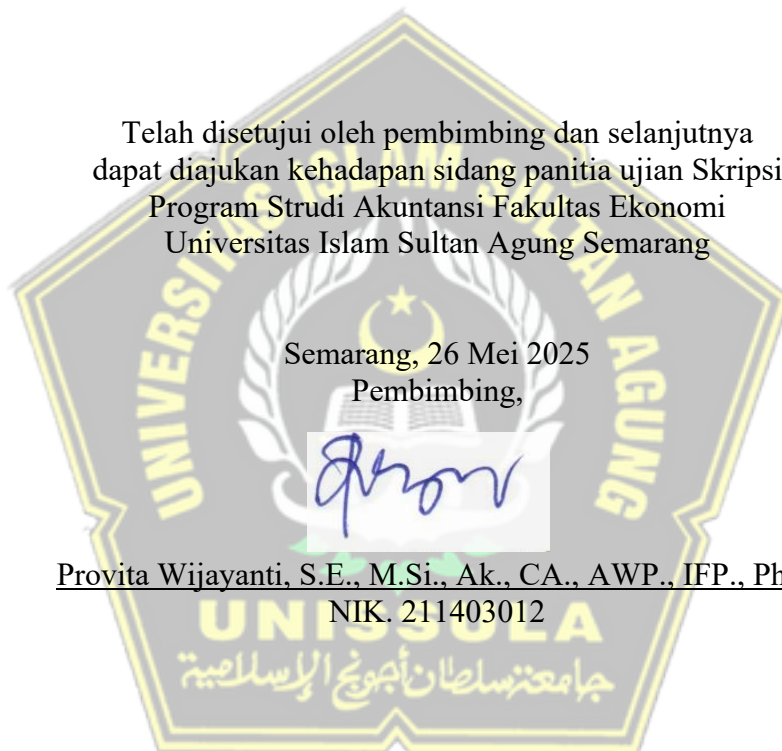
Disusun Oleh :
Adriyana Sinta Devi
NIM : 31402300195

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 26 Mei 2025
Pembimbing,



Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., AWP., IFP., Ph.D
NIK. 211403012



DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Disusun Oleh :
Adriana Sinta Devi
NIM : 31402300195

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 26 Mei 2025

Susunan Dewan Penguji

Penguji 1,



Dr. H. M. Jafar Shodiq, SE, S.Si., M.Si., Akt., CA., ACPA.,
CSRA., CSRS
NIK 211403012

Penguji 2,



Dr. E. Drs. Chrisna Suhendi, SE, MBA, Ak, CA
NIK 210493034

Pembimbing,



Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP.
NIK 211403012

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi Tanggal 26 Mei 2025

Ketua Program Studi S-1 Akuntansi



Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., AWP., IFP., Ph.D

NIK 211403012

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adriyana Sinta Devi
NIM : 31402300195
Program Studi : S-1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi UNISSULA

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya dengan judul :

“Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro”

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Bojonegoro, 26 Mei 2025

Yang Menyatakan,



Adriyana Sinta Devi
NIM. 31402300195

ABSTRAK

“Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro”

Di era reformasi, pengelolaan laporan keuangan terus diperbaiki untuk meningkatkan tata kelola Di era reformasi, pengelolaan laporan keuangan terus diperbaiki untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis determinan kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro yang meliputi peran Sistem Akuntansi Digital, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua pejabat pengelola keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bojonegoro. Sampel penelitian ini diambil menggunakan metode purposive sampling, dengan sampel sebanyak 118 responden dari 59 OPD di Kabupaten Bojonegoro. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini yang diolah dengan menggunakan Smart PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi digital, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan diharapkan memberikan rekomendasi diharapkan memberikan kontribusi dalam peningkatan akuntabilitas, kinerja OPD, dan pengambilan keputusan strategis di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

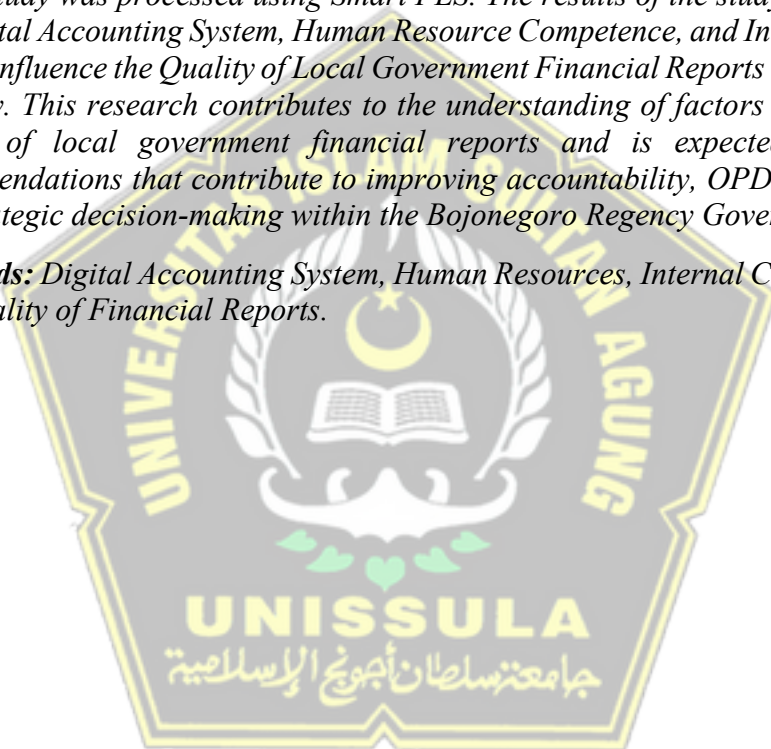
Kata Kunci: Sistem Akuntansi Digital, Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Kualitas Laporan Keuangan.

جامعته سلطان أبوبوع الإسلامية

ABSTRACT

In the era of reform, the management of financial reports continues to improve in order to enhance government governance. The aim of this study is to analyze the determinants of the quality of local government financial reports in Bojonegoro Regency, which include the role of Digital Accounting Systems, Human Resource Competence, and Internal Control Systems. The data used in this study are primary data. The population in this research consists of all financial management officials within the Regional Apparatus Organizations (OPD) in Bojonegoro Regency. The sample was selected using a purposive sampling method, with a total of 118 respondents from 59 OPD's in Bojonegoro Regency. The analysis technique used in this study was processed using Smart PLS. The results of the study indicate that the Digital Accounting System, Human Resource Competence, and Internal Control System influence the Quality of Local Government Financial Reports in Bojonegoro Regency. This research contributes to the understanding of factors that affect the quality of local government financial reports and is expected to provide recommendations that contribute to improving accountability, OPD performance, and strategic decision-making within the Bojonegoro Regency Government.

Keywords: Digital Accounting System, Human Resources, Internal Control System, and Quality of Financial Reports.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur senantiasa penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik yang berjudul **“Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi skripsi dalam rangka menyelesaikan studi Strata Satu untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sudah sepatutnya dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan hambanya-Nya dalam segala urusan.
2. Bapak Prof. Dr. Heru Sulisty, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP, selaku Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia memberikan waktu serta bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. E. Drs. Chrisna Suhendi, SE, MBA, Ak, CA dan Bapak Dr. H. M. Jafar Shodiq, SE, S.Si., M.Si., Akt., CA., ACPA., CSRA., CSRS selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah bersedia memberikan masukan dan waktu untuk menguji saya.

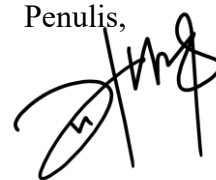
5. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan banyak ilmunya, sehingga penulis mendapat pengetahuan yang dapat digunakan dimasa yang akan datang.
6. Kepada Bapak (Alm.) Agung Supramono dan Ibu Lianawati, yang tidak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan. Semoga segala pengorbanan dan kasih sayang mereka menjadi pembuka jalan menuju surga-Nya.
7. Terima kasih untuk teman-teman S-1 Akuntansi RPL Bojonegoro 2024 yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
8. Terima kasih untuk rekan-rekan kerja di BPKAD Kabupaten Bojonegoro dan semua pihak yang telah memberi bantuan dalam penulisan skripsi ini

Penulis menyadari bahwasanya masih ada keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki dalam penyusunan Skripsi ini, sehingga menimbulkan ketidak sempurnaan dalam Skripsi ini. Penulis menantikan kritik, saran juga pesan dari pembaca. Besar harapan penulisn bahwa hasil Skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bojonegoro, 26 Mei 2025

Penulis,



Adriyana Sinta Devi

NIM. 31402300195

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	8
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	8
1.4 MANFAAT PENELITIAN	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1 LANDASAN TEORI.....	10
2.1.1 <i>Theory Stewardship</i>	10
2.2 VARIABEL PENELITIAN.....	11
2.2.1 Kualitas Laporan Keuangan	11
2.2.2 Sistem Akuntansi Digital	12
2.2.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia	13
2.2.4 Sistem Pengendalian Internal.....	14
2.3 PENELITIAN TERDAHULU	15
2.3 PENGEMBANGAN HIPOTESIS	19
2.4 KERANGKA PENELITIAN	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 JENIS PENELITIAN.....	23
3.2 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN	23
3.2.1 Populasi Penelitian	23
3.2.2 Sampel Penelitian	25

3.3 SUMBER DAN JENIS DATA	26
3.4 METODE PENGUMPULAN DATA	26
3.5 DEFINISI VARIABEL DAN INDIKATOR.....	27
3.5.1 Variabel Independen	27
3.5.2 Variabel Dependen	27
3.5.3 Definisi Operasional Variabel	28
3.6 METODE ANALISIS DATA.....	30
3.6.1 Analisis Data Menggunakan <i>Structural Equation Model</i> (PLS)	30
3.6.2 Merancang Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	31
3.6.3 Merancang Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	32
3.6.4 Pengujian Hipotesis	32
3.6.5 Alur Analisis Data Menggunakan <i>SMART-PLS</i>	34
BAB IV PEMBAHASAN.....	35
4.1 GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	35
4.2 PENGUJIAN DAN HASIL ANALISIS DATA.....	38
4.2.1 Pengujian Pengukuran Model (<i>Outer Model</i>)	38
4.2.2 Pengujian Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	42
4.2.3 Uji Hipotesis	42
4.3 PENGUJIAN DAN HASIL ANALISIS DATA.....	44
4.3.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Digital terhadap Kualitas Laporan Keuangan	44
4.3.2 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan	46
4.3.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	48
BAB V PENUTUP.....	50
5.1 KESIMPULAN.....	50
5.2 KETERBATASAN PENELITIAN	51
5.3 SARAN	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN.....	54

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 3.1 Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	24
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel	28
Tabel 3.3 Pengukuran Skala Likert.....	30
Tabel 4.1 Rincian Penyebaran Kuesioner	35
Tabel 4.2 Jabatan	36
Tabel 4.3 Jenis Kelamin.....	36
Tabel 4.4 Jenis Pendidikan Terakhir.....	37
Tabel 4.5 Lama Bekerja	37
Tabel 4.6 Validitas Konvergen	39
Tabel 4.7 Validitas Diskriminan	40
Tabel 4.8 Uji Reliabilitas	41
Tabel 4.9 Nilai R-Square.....	42
Tabel 4.10 Uji Hipotesis	43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Kabupaten Bojonegoro.....	7
Gambar 2.1 : Kerangka Penelitian	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.1 : Alur Analisis Data Menggunakan SMART-PLS.....	34
Gambar 4.1: Model Struktural	38
Gambar 4.2 : Output Bootstrapping	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner Uji Penelitian	54
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tuntutan masyarakat terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah yang berkualitas serta berorientasi pada prinsip good governance semakin meningkat. Kondisi ini mendorong perlunya pergeseran paradigma dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk pembaruan prinsip-prinsip manajerial yang mencakup tahapan perencanaan anggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Seiring dengan era reformasi, sistem pengelolaan keuangan publik terus mengalami perbaikan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara diperkuat melalui penerapan Paket Undang-Undang Keuangan Negara. Paket ini mencakup tiga regulasi utama, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur kerangka umum pengelolaan keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berfokus pada pelaksanaan anggaran dan pengelolaan kas, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang mengatur mekanisme audit dan akuntabilitas keuangan oleh lembaga yang berwenang.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tahun 2017, laporan keuangan merupakan penyajian yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas, yang

bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan tentang kondisi keuangan, kinerja, serta arus kas entitas guna mendukung pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang berkualitas harus bebas dari kesalahan penyajian material, menyampaikan informasi secara lengkap dan transparan (full disclosure), serta menyajikan angka-angka yang dapat dipertanggungjawabkan dan ditelusuri. Hal ini bertujuan agar laporan tersebut mampu menyediakan informasi keuangan yang akurat dan dibutuhkan oleh para pengguna laporan (Gasperz, 2019).

Pemerintahan yang menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas ditandai dengan adanya jaminan bahwa seluruh informasi serta aktivitas penting pemerintah terdokumentasi secara sistematis dan dapat diukur melalui indikator-indikator yang jelas, yang kemudian dirangkum ke dalam laporan keuangan melalui proses akuntansi (Syarifudin et al., 2020). Sistem akuntansi keuangan daerah berperan sebagai serangkaian prosedur terstruktur yang mencakup tahap pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga penyusunan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan (Ardianto & Eforis, 2019).

Sistem Informasi Akuntansi Digital pada pemerintah daerah merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, yang mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Implementasi sistem informasi akuntansi keuangan ini menjadi elemen penting dalam upaya menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pengelolaan keuangan daerah melalui sistem informasi tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan teknologi informasi dalam setiap proses pencatatan dan

pelaporan keuangan guna meningkatkan efisiensi, akurasi, serta keandalan data keuangan yang disajikan.

Keandalan laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem informasi yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi secara signifikan oleh kompetensi sumber daya manusia (SDM) serta efektivitas sistem pengendalian internal. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Digital, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan akuntabel. Namun, pemanfaatannya akan optimal jika didukung oleh SDM yang kompeten dan sistem pengendalian internal yang kuat. Ketiganya saling berpengaruh dalam menciptakan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar.

Penelitian mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan telah dilakukan oleh Sumaryati, Novitasari, dan Machmudah (2020), yang menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil tersebut sejalan dengan temuan yang diperoleh dalam penelitian Darmawan dan Darwanis (2018), Gasperz (2019), Tawaqal dan Suparno (2019), serta Sundari dan Rahayu (2019). Namun demikian, hasil tersebut tidak sejalan dengan temuan Merlyn, Kalumata, dan Ilat (2015) serta Sriyono (2020), yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan efektivitas sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, temuan yang tidak konsisten dari berbagai studi menunjukkan bahwa masih diperlukan penelitian lanjutan dalam konteks daerah tertentu, termasuk di Bojonegoro.

Sistem pengendalian internal merupakan salah satu faktor krusial yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Darmawan dan Darwanis (2018), sistem ini bertujuan untuk membantu organisasi dalam mencapai efisiensi dan efektivitas operasional melalui pelaksanaan kegiatan yang terencana dan terkendali. Selain itu, sistem pengendalian internal juga berperan dalam menjamin keandalan laporan keuangan, melindungi aset negara, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan itu, Gasperz (2019) menegaskan bahwa penerapan pengendalian internal secara berkelanjutan sangat penting guna meminimalkan kesalahan dan risiko, serta mendorong peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) memiliki peran krusial dalam menjamin akurasi dan keandalan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. SPI yang efektif dapat meminimalkan risiko kesalahan serta kecurangan, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kualitas laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa kewajaran informasi keuangan dalam laporan keuangan dinilai

berdasarkan efektivitas sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh entitas pemerintah.

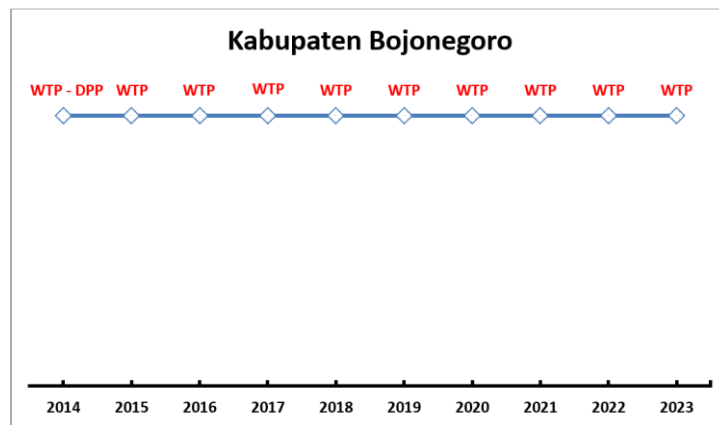
Adanya dukungan sistem pengendalian intern yang efektif memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, penilaian atas kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dilakukan berdasarkan tingkat efektivitas penerapan sistem pengendalian intern. Dalam hal ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal secara konsisten melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian intern tersebut, yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk menentukan sejauh mana ruang lingkup dan kedalaman pemeriksaan yang diperlukan.

Dalam praktiknya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal, secara konsisten melakukan evaluasi terhadap efektivitas SPI dalam setiap proses audit. Evaluasi tersebut tidak hanya berfungsi untuk menilai tingkat kepatuhan dan integritas sistem yang diterapkan, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan luas lingkup dan kedalaman pengujian yang akan dilakukan selama proses pemeriksaan. Dengan demikian, keberadaan SPI yang memadai merupakan faktor fundamental dalam mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dan dapat dipercaya.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dievaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diberikan opini audit sebagai bentuk penilaian atas kewajarannya. Pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK

mencerminkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun dan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, serta menunjukkan kualitas pelaporan keuangan yang baik (Tawaqal & Suparno, 2017). Sebagai entitas pelaporan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro memiliki tanggung jawab untuk menyusun dan menyajikan LKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu indikator keberhasilan dalam mewujudkan akuntabilitas publik dapat dilihat dari opini audit yang diperoleh atas LKPD tersebut.

Setiap tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengevaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan diberikan opini audit sebagai bentuk penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut. Opini yang dapat diberikan antara lain Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), dan Tidak Wajar (TW). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan bahwa laporan tersebut telah memenuhi standar dan kriteria pelaporan yang berlaku. Hal ini mengindikasikan bahwa laporan keuangan telah disusun dan disajikan secara andal, relevan, dapat dibandingkan, serta mudah dipahami oleh para pengguna informasi keuangan (Prabowo, 2021).



Gambar 1. 1 Hasil Pemeriksaan LKPD Kabupaten Bojonegoro

Dalam perjalanannya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menerima opini WTP selama 10 tahun berturut-turut, meskipun pada tahun 2014 mendapat opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP). Dalam pemeriksaannya, BPK masih menemukan sejumlah masalah dalam praktik pengelolaan keuangan seperti lemahnya sistem pengendalian internal, keterbatasan SDM, dan keterlambatan pelaporan. Menurut BPK, opini WTP bukan jaminan bebas dari kecurangan, dan masih adanya penyimpangan dalam laporan keuangan menunjukkan perlunya peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang dijuluki sebagai kota minyak memiliki APBD yang sangat besar mencapai Rp7,4 triliun pada tahun 2023 dan menduduki posisi ke-2 APBD tertinggi se-Indonesia. Jika APBD tinggi tentunya tugas dan tanggung jawab semakin besar untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel. Berdasarkan permasalahan yang muncul menjadi indikator bahwa kualitas laporan keuangan daerah perlu dikaji lebih dalam. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana sistem akuntansi digital, kapasitas Sumber Daya Manusia, dan efektivitas sistem pengendalian internal berkontribusi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dengan melakukan penelitian terkait Determinan Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro yang meliputi Sistem Akuntansi Digital, Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal. Oleh karena itu penelitian ini hendak menguji beberapa persoalan sebagai berikut:

- 1) Apakah Sistem Akuntansi Digital berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)?
- 2) Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)?
- 3) Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji secara empiris:

- 1) Menganalisis secara empiris pengaruh penerapan sistem akuntansi digital keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- 2) Menganalisis secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- 3) Menganalisis secara empiris pengaruh efektivitas sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1) Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya serta berkontribusi sebagai bahan perbandingan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi digital, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan kualitas laporan keuangan. Selain itu, diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi sarana untuk memperluas wawasan dan menambah referensi terkait kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota, yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi positif dan manfaat yang berkelanjutan di masa mendatang.

2) Manfaat Praktis

- a. Dari hasil penelitian ini dimaksudkan dapat menambah pengalaman, wawasan dengan membandingkan teori dengan praktik yang terjadi dan sebagai referensi atau dasar untuk pengambilan keputusan terhadap kualitas pelaporan keuangan.
- b. Sebagai bahan masukan yang dapat digunakan sebagai dasar pemerintah untuk bisa mengembangkan strategi, kebijakan, dan program yang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja OPD
- c. Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang selanjutnya dapat dijadikan motivasi dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga dapat memberikan informasi yang akuntabilitas.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 *Theory Stewardship*

Penelitian ini didasari oleh teori stewardship sebagai landasan teoritis utama. Teori ini menjelaskan bahwa para eksekutif tidak semata-mata digerakkan oleh kepentingan pribadi, melainkan berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan (Donaldson & Davis, 1991). Penelitian akuntansi untuk organisasi sektor publik, seperti pemerintah dan organisasi nirlaba lainnya, dapat menggunakan teori stewardship (Wilson, 2010). Akuntansi sektor publik telah dipersiapkan sejak awal perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan informasi akan hubungan antara steward dan prinsipal.

Hubungan Stewardship theory terhadap kualitas laporan keuangan daerah yaitu eksekutif sebagai steward dapat bertindak sesuai kepentingan masyarakat, dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan kekayaan negara kepada masyarakat (Löhde, Campopiano, and Calabrò 2020).

Implikasi dari stewardship theory dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menjelaskan peran pemerintah daerah sebagai entitas yang dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik. Pemerintah daerah diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat serta menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dikelolanya. Dengan

demikian, tujuan ekonomi, peningkatan pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal. Para steward, termasuk manajemen dan auditor internal memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan keahlian mereka dalam memperkuat efektivitas sistem pengendalian internal, sehingga mampu menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas, andal, dan akuntabel.

2.2 VARIABEL PENELITIAN

2.2.1 Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Mulyana (2010), kualitas dapat dimaknai sebagai tingkat kesesuaian terhadap standar yang telah ditetapkan, yang pengukurannya didasarkan pada tingkat ketidaksesuaian dan dicapai melalui proses pemeriksaan atau evaluasi. Dalam konteks pemerintahan daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban resmi atas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama satu tahun anggaran. Kualitas laporan keuangan mengacu pada informasi yang disajikan secara wajar, bebas dari distorsi maupun kesalahan material, mencerminkan kondisi yang sebenarnya, serta dapat diverifikasi oleh pihak yang berwenang. Karakteristik kualitas laporan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga tujuan dalam sebuah organisasi. Karakteristik kualitas laporan menurut peraturan tersebut meliputi (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, (4) dapat dipahami.

2.2.2 Sistem Akuntansi Digital

Sistem akuntansi digital menggantikan sistem manual dengan pemanfaatan teknologi informasi yang memungkinkan proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan dilakukan secara lebih efisien, akurat, dan transparan. Peningkatan akurasi, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang dihasilkan dari sistem digital ini akan membantu menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penggunaan teknologi informasi dalam sistem akuntansi pemerintah daerah tidak hanya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan, tetapi juga memperkuat pengelolaan keuangan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan publik.

Sistem Akuntansi Digital Keuangan Daerah adalah sistem yang menggunakan teknologi digital untuk membuat, mengelola, menyimpan, dan memindahkan informasi keuangan daerah secara elektronik. Sistem ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan auditabel. Berikut ini beberapa sistem akuntansi keuangan daerah:

a. SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)

Aplikasi keuangan daerah yang mengintegrasikan mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan secara digital dan terintegrasi. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 menjadi dasar hukum bagi seluruh pemerintah daerah untuk menggunakan SIPD.

b. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Sistem Informasi Manajemen Daerah atau SIMDA merupakan software yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sejak tahun 2003 sebagai upaya untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan teknologi informasi. SIMDA dirancang secara komprehensif dengan berbagai modul terintegrasi, antara lain SIMDA Barang Milik Daerah (BMD), SIMDA Pendapatan, SIMDA Keuangan, SIMDA Perencanaan, SIMDA Gaji, dan SIMDA Cash Management System (CMS). Setiap modul mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah secara sistematis dan terdokumentasi.

c. SAKD (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah)

- d. Aplikasi yang dikembangkan Kementerian Keuangan untuk menyajikan dan menyusun laporan keuangan berbasis akrual sesuai standar pemerintah. Aplikasi ini mendukung proses rekonsiliasi dan pelaporan dari pemerintah daerah ke pusat.

2.2.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kualitas tinggi merupakan aset penting bagi organisasi dalam mencapai tujuan secara lebih efisien dan efektif. Kompetensi SDM menjadi faktor strategis yang memengaruhi kemampuan organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya secara optimal. Individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan akan menunjukkan produktivitas yang tinggi serta mampu menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat.

Dalam konteks pelaporan keuangan, SDM yang kompeten sangat berperan dalam menjamin keakuratan dan ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan, karena mereka memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip akuntansi dan keuangan, serta latar belakang pendidikan yang mendukung. Selain itu, SDM yang menyusun laporan keuangan dituntut untuk memiliki integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Hal ini sejalan dengan asumsi dasar teori *stewardship*, yang menyatakan bahwa individu secara alamiah memiliki karakter dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan berperilaku jujur dalam menjalankan amanah yang diberikan (Rifandi, 2019).

2.2.4 Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan sistem yang mencakup struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang saling terkoordinasi guna melindungi aset organisasi, memastikan ketelitian serta keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi operasional, dan menjamin kepatuhan terhadap kebijakan manajemen (Mulyadi, 2013). Sementara itu, Hery (2013) mendefinisikan pengendalian internal sebagai sekumpulan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk melindungi kekayaan entitas dari potensi penyalahgunaan, menyediakan informasi akuntansi yang akurat dan andal, serta menjamin bahwa seluruh aktivitas organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebijakan internal yang berlaku. Kedua definisi ini menunjukkan bahwa pengendalian internal memiliki peran penting dalam menjaga integritas keuangan organisasi sekaligus mendukung terciptanya tata kelola yang baik.

2.3 PENELITIAN TERDAHULU

Tinjauan penelitian terdahulu ini sebagai landasan yang memperkuat kerangka teori dalam penelitian ini, serta menjadi acuan yang relevan dalam mendukung analisis dan perumusan masalah yang sedang dikaji.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti Tahun	Variabel, Sampel & Teknik Analisis	Hasil
1	(Khairaningrum Mulyanti dan Rahma 2020)	Variabel dependen: Kualitas laporan keuangan Variabel Independen: Penerapan <i>Good Corporate</i> Sampel: 120 karyawan iron birds logistic Metode: Analisis Regresi Linear Sederhana Berganda	• Terdapat pengaruh antara penerapan good corporate governance (X) terhadap kualitas laporan keuangan (Y)
2	(Gusherinsya dan Samukri 2020)	Variabel Dependen: Kualitas laporan keuangan Variabel Independen: Sistem akuntansi keuangan Sampel: 47 pegawai PT. CSM Cargo Metode: Uji analisis regresi linier sederhana	• Penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
3	(Jauhari, Dewata dan Suhairi Hazisma 2021)	Variabel Dependen: Kualitas laporan keuangan Variabel Independen: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Kompetensi Staf Akuntansi	• Penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah • Sistem pengendalian intern pemerintah tidak memoderasi pengaruh antara standar akuntansi pemerintah sistem

No	Peneliti Tahun	Variabel, Sampel & Teknik Analisis	Hasil
		Sampel: 46 pegawai yang bekerja di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia Metode: Model analisis regresi yang digunakan adalah Moderated Regresion Analysis (MRA).	akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4	(Rahmawati, Mustika dan Eka 2018)	Variabel Dependen: Kualitas laporan keuangan Variabel Independen: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal Sampel: 37 SKPD Pemerintah Kota Tangerang Selatan Alat analisis regresi berganda Metode: Uji analisis regresi linier sederhana	• Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan • Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan • Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
5	(Veny Mufidatus Saffanah, Dwi Suhartini 2024)	Variabel Dependen: Kualitas laporan keuangan Variabel Independen: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sampel: 41 pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik Metode:	• Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan • Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan • Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

No	Peneliti Tahun	Variabel, Sampel & Teknik Analisis		Hasil
		Metode sampling dengan analisis Smart PLS	purposive dengan analisis	
6	(Bestari, K. A., & Wahyuni, F. 2023)	Variabel Dependen: Kualitas laporan keuangan Variabel Independen: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Daerah, Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal Sampel: 24 OPD Kota Tegal Metode: Analisis linear berganda dengan menggunakan software IBM SPSS.	• Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan • Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan • Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan • Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan • Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan	
7	(Tyas Kurnia Sari 2022)	Variabel Dependen: Kualitas laporan keuangan Variabel Independen: Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Pemerintah, Good Corporate Governance, Sistem Informasi Akuntansi, Teknologi Informasi Sampel: 78 PNS di Kabupaten Demak Metode: Uji analisis regresi linier sederhana	• Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan • Kualitas Aparatur Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan • Good Corporate Governance berpengaruh positif terhadap kualitas laporan • Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan • Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan	
8	Nadia Ramadhani dan Rizal Yaya 2024	Variabel Dependen: Kualitas laporan keuangan Variabel Independen:	• <i>Good governance</i> dan kompetensi sumber daya manusia meningkatkan kualitas laporan keuangan	

No	Peneliti Tahun	Variabel, Sampel & Teknik Analisis	Hasil
		Pemanfaatan Teknologi, <i>Good Governance</i> , dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Variabel Moderasi: Sistem pengendalian internal Sampel: 98 Pegawai di OPDP emerintah Provinsi DI Yogyakarta Metode: Metode purposive sampling dengan analisis Smart PLS	• Sistem pengendalian internal memperkuat pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. • Pemanfaatan teknologi informasi tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan
9	(Ikhsan Budi Riharjo, 2023)	Variabel Dependen: Kualitas laporan keuangan Variabel Independen: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintah Sampel: 34 OPD Dinas di Pemerintah Provinsi Jawa Timur Metode: Analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS	• Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. • Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. • Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
10	(Vira Varista, 2022)	Variabel Dependen: Kualitas laporan keuangan Variabel Independen: Pengendalian Internal dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Sampel: SKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah Metode:	• Terdapat pengaruh positif dan signifikan pada pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Kotawaringin. • Terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan pada variabel kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan

No	Peneliti Tahun	Variabel, Sampel & Teknik Analisis	Hasil
		Analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS	pada SKPD Kabupaten Kotawaringin.

2.3 PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diabarkan serta dikaitkan dengan landasan teori yang relevan maka hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.3.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Digital terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sistem akuntansi digital menggantikan sistem manual dengan pemanfaatan teknologi informasi yang memungkinkan proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan dilakukan secara lebih efisien, akurat, dan transparan. Peningkatan akurasi, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang dihasilkan dari sistem digital ini akan membantu menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penggunaan digitalisasi dalam sistem akuntansi pemerintah daerah tidak hanya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan, tetapi juga memperkuat pengelolaan keuangan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan publik.

Berdasarkan *Stewardship theory*, pemerintah daerah dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, memerlukan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan penerapan sistem mulai dari pengelompokan, penggolongan, pencatatan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah kedalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi

yang nantinya dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan oleh masing-masing OPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga diharapkan mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas.

Pemerintah daerah membutuhkan sistem yang mampu menghasilkan laporan keuangan serta informasi keuangan lainnya secara menyeluruh, mencakup informasi mengenai posisi keuangan, kinerja fiskal, dan tingkat akuntabilitas. Oleh karena itu, penerapan sistem informasi yang terintegrasi dan andal berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Maka hipotesisnya sebagai berikut:

H1 : Sistem Akuntansi Digital berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2.3.2 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kompetensi sumber daya manusia yang memiliki kemampuan sesuai kapasitasnya, yaitu kompetensi perseorangan, badan atau lembaga, atau peraturan dalam menjalankan tugas sesuai wewenang. Berdasarkan hal tersebut serupa dengan riset terdahulu yang disusun oleh Vira Varista (2022), sumber daya manusia mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan menurut penelitiannya. Hal ini menunjukkan bahwa jika sumber daya manusia dikelola dengan baik, maka akan

tercipta sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas, laporan keuangan dapat diandalkan.

Maka hipotesisnya sebagai berikut:

H2 : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2.3.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sistem pengendalian internal merupakan suatu mekanisme yang terstruktur dan saling terkoordinasi untuk melindungi aset organisasi serta memastikan ketepatan dan keandalan pencatatan transaksi akuntansi. Berdasarkan pandangan Mulyadi (2014:163), pengendalian internal dapat disimpulkan sebagai serangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang dan dilaksanakan oleh individu atau pihak yang berwenang guna memberikan jaminan atas efisiensi dan efektivitas operasional, keandalan pelaporan keuangan, serta patuh terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku.

Maka hipotesisnya sebagai berikut :

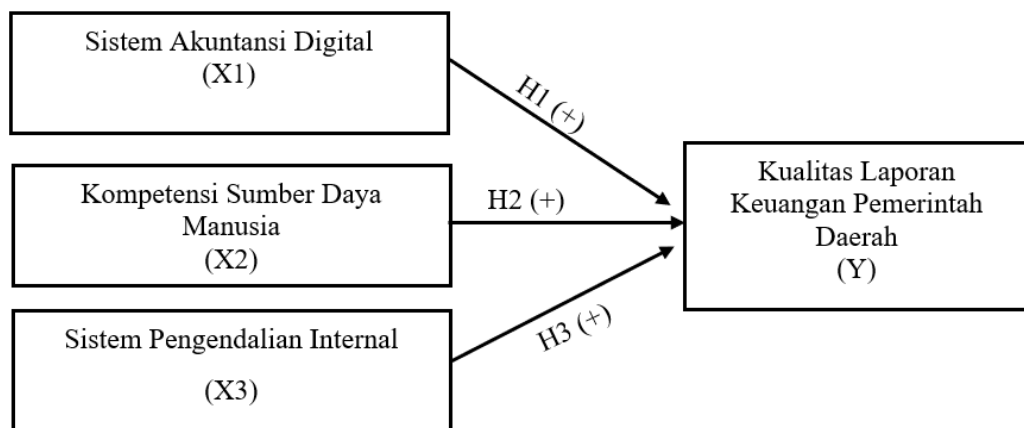
H3 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan .

2.4 KERANGKA PENELITIAN

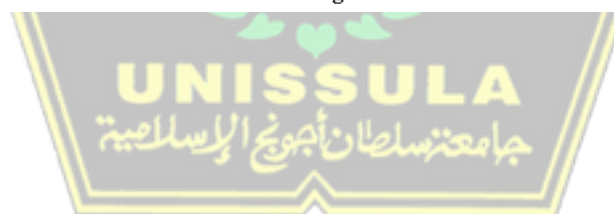
Stewardship theory menyatakan bahwa para eksekutif cenderung akan semakin termotivasi untuk bertindak dalam kepentingan organisasi dibandingkan penelitian dengan kepentingan mereka sendiri (Donaldson and Davis 1991; Schillemans and Bjurström 2020). Hubungan *Stewardship theory* dengan kualitas

laporan keuangan daerah ketika eksekutif sebagai steward bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Untuk mewujudkannya pihak eksekutif berusaha membuat laporan keuangan daerah yang berkualitas, dengan mewujudkan laporan keuangan daerah yang berkualitas diperlukan adanya penerapan Sistem Akuntansi Digital, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal. Adapun kerangka penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian eksplanatori. Penelitian eksplanatori merupakan sebuah penelitian yang menggambarkan hubungan variabel X dengan variabel Y. Penelitian ini juga termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif, dimana basis yang digunakan adalah filsafat positivisme. Filsafat positivisme melihat fenomena secara konkrit, terukur dan menilai hubungan dengan sebab-akibat (Sugiyono, 2014). Penelitian Kuantitatif adalah penelitian yang terstruktur dan sistematis dari proses awal penelitian sampai dengan akhir Penelitian (Sahir, 2022a). Proses penelitian kuantitatif dilaksanakan dengan proses deduktif dimana dalam perumusan hipotesis terbentuk dari menjawab rumusan masalah yang dikaitkan dengan teori. Hipotesis tersebut diuji dengan populasi dan sampel tertentu serta dianalisis dengan sifat kuantitatif atau statistik sesuai keadaan di lapangan (Sugiyono, 2014).

3.2 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN

3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi adalah suatu wilayah yang general dan terdiri dari objek/subjek yang memiliki identitas khusus dimana oleh peneliti ditetapkan untuk dipelajari, diteliti dan kemudian ditarik kesimulannya (Sugiyono, 2014). Penelitian ini menggunakan populasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan penelitian terdahulu belum ada yang melakukan

penelitian terkait peran sistem akuntansi digital, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah oleh karena itu peneliti tertarik mengambil populasi di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki 59 Organisasi Perangkat Daerah, yang terdiri dari:

Tabel 3.1
Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

1	Dinas Pendidikan	31	Sekretariat Daerah
2	Dinas Kesehatan	32	Kecamatan Bojonegoro
3	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	33	Kecamatan Kapas
4	Dinas PU Sumber Daya Air	34	Kecamatan Balen
5	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	35	Kecamatan Sumberrejo
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	36	Kecamatan Kanor
7	Satuan Polisi Pamong Praja	37	Kecamatan Baureno
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	38	Kecamatan Sugihwaras
9	Dinas Pemadam Kebakaran	39	Kecamatan Kepohbaru
10	Dinas Sosial	40	Kecamatan Kedungadem
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	41	Kecamatan Sukosewu
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	42	Kecamatan Trucuk
13	Dinas Lingkungan Hidup	43	Kecamatan Malo
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	44	Kecamatan Kalitidu
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	45	Kecamatan Dander
16	Dinas Perhubungan	46	Kecamatan Padangan
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	47	Kecamatan Purwosari

18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	48	Kecamatan Kasiman
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	49	Kecamatan Kedewan
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	50	Kecamatan Ngasem
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	51	Kecamatan Ngambon
22	Dinas Peternakan dan Perikanan	52	Kecamatan Tambakrejo
23	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	53	Kecamatan Ngraho
24	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	54	Kecamatan Margomulyo
25	Sekretariat DPRD	55	Kecamatan Temayang
26	Inspektorat	56	Kecamatan Bubulan
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	57	Kecamatan Gondang
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	58	Kecamatan Sekar
29	Badan Pendapatan Daerah	59	Kecamatan Gayam
30	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan		

3.2.2 Sampel Penelitian

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu dan dianggap mampu mewakili keseluruhan populasi. Dalam penelitian ini digunakan teknik sampling jenuh, yaitu metode penentuan sampel di mana seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Teknik ini dipilih karena seluruh populasi dinilai relevan dan memenuhi kriteria untuk dianalisis secara menyeluruh (Sugiyono, 2014). Pada penelitian ini sampel yang dipilih adalah semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 118 responden yang terdiri dari pejabat penatausahaan keuangan (PPK) dan bendahara pengeluaran. Penelitian ini dalam pengambilan sampelnya menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling ialah teknik yang dapat digunakan dalam menetapkan sampel penelitian berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan

tertentu dengan tujuan supaya data penelitian yang didapatkan bisa lebih representative (Sugiyono, 2015). Kriteria penentuan sampel yaitu:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- b. Pegawai yang memiliki tanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan di instansi terkait;
- c. Pegawai yang terlibat secara langsung dalam implementasi sistem akuntansi digital, sistem pengendalian internal, serta yang berkaitan dengan aspek kompetensi sumber daya manusia pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

3.3 SUMBER DAN JENIS DATA

Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan langsung oleh pengumpul data atau peneliti (Sugiyono, 2014). Pada penelitian ini seluruh data dikumpulkan langsung dari responden melalui kuesioner dengan menggunakan metode pengumpulan data orisinil. Penelitian ini melibatkan sebanyak 118 responden yang terdiri dari Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

3.4 METODE PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket. Metode angket merupakan suatu metode pengumpulan data dimana penulis secara langsung atau tidak langsung menyebarkan pendapat dan pertanyaan tertulis kepada responden dan meminta mereka untuk memberikan tanggapan (Sugiyono, 2019). Jika jumlah responden sangat banyak dan tersebar luas,

sebaiknya gunakan survei. Survei dapat berisi pertanyaan atau komentar publik atau pribadi. Berdasarkan metode survei, penulis mendistribusikan angket secara online menggunakan *Google Formulir*.

3.5 DEFINISI VARIABEL DAN INDIKATOR

3.5.1 Variabel Independen

Variabel independent atau sering disebut juga sebagai variabel bebas, merupakan variabel yang memengaruhi variabel lain dan menjadi faktor penyebab terjadinya perubahan pada variabel tersebut (Sahir, 2022). Dalam penelitian ini, variabel independen terdiri atas Sistem Akuntansi Digital, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal (X).

3.5.2 Variabel Dependen

Variabel dependen atau disebut juga variabel terikat, adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen dan merupakan hasil atau akibat dari adanya perubahan pada variabel independen (Sugiyono, 2017). Pada penelitian ini, variabel dependen yang dianalisis adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

3.5.3 Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.2
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Pengertian	Indikator	Skala
1	Sistem Akuntansi Digital	Sistem akuntansi merupakan subsistem atau bagian dari suatu organisasi yang memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi keuangan untuk mendukung manajemen dalam mengambil keputusan (Setyowati, Ishika, & Pratiwi 2016).	1. Pengelompokan 2. Pengklasifikasian 3. Pencatatan (Setyowati, Ishika, & Pratiwi 2016).	Skala Likert 1-5
2	Kompetensi Sumber Daya Manusia	Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab yang telah diberikan melalui modal pelatihan, pendidikan, dan pengalaman yang kompeten (Setyowati, Ishika, & Pratiwi 2016).	1. Pengetahuan 2. Ketrampilan 4. Kemampuan & Pengalaman (Setyowati, Ishika, & Pratiwi 2016).	Skala Likert 1-5

3	Sistem Pengendalian Internal	Sistem pengendalian intern adalah suatu prosedur yang merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya (Tawaqal & Suparno, 2017).	1. Efektivitas 2. Efesiensi 3. Ekonomis (Tawaqal & Suparno, 2017).	Skala Likert 1-5
4	Kualitas Laporan Keuangan	Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pemantauan Laporan Keuangan (Setyowati, Ishika, & Pratiwi 2016).	Skenario kasus dengan indikator sebagai berikut: 1. Relevan 2. Dapat Dinilai/Dibandingkan 3. Andal 4. Dapat Dipahami (Setyowati, Ishika, & Pratiwi 2016)	Skala Likert 1-5

PENGUKURAN VARIABEL

Metode pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, yang digunakan untuk mengukur persepsi responden terhadap variabel sistem akuntansi digital, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal. Melalui pendekatan ini, setiap variabel dijabarkan ke dalam sejumlah indikator yang kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan item-item instrumen penelitian berupa pernyataan atau pertanyaan. Skala Likert yang digunakan terdiri dari lima tingkat penilaian, yaitu:

Tabel 3.3 : Pengukuran Skala Likert

Jawaban	Skor Pertanyaan Positif	Skor Pertanyaan Negatif
Sangat Setuju (SS)	5	1
Setuju (S)	4	2
Nertal (N)	3	3
Tidak Setuju (TS)	2	4
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	5

3.6 METODE ANALISIS DATA

Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mengelola data yang telah terkumpul, tanpa bermaksud untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum atau melakukan generalisasi. Dalam penelitian ini, pendekatan statistik deskriptif digunakan sebagai bagian dari proses analisis data (Sugiyono, 2017).

3.6.1 Analisis Data Menggunakan *Structural Equation Model* (PLS)

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan perangkat lunak SmartPLS, yang dioperasikan melalui media komputer. Teknik Partial Least Square (PLS) merupakan pendekatan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis varian, yang memungkinkan dilakukannya pengujian terhadap model pengukuran dan model struktural secara simultan. Model pengukuran digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas konstruk, sedangkan model struktural digunakan untuk menguji hubungan kausal antar variabel. Proses estimasi dalam PLS dilakukan melalui teknik bootstrapping, yaitu metode penggandaan sampel secara acak untuk menguji signifikansi statistik dari parameter-parameter model.

3.6.2 Merancang Model Pengukuran (Outer Model)

Model pengukuran, yang juga dikenal sebagai **outer model**, berfungsi untuk menghubungkan indikator-indikator yang terukur dengan variabel laten yang diwakilinya. Pada indikator reflektif, pengujian outer model dilakukan untuk memastikan bahwa indikator-indikator tersebut valid dan reliabel dalam merepresentasikan konstruk laten. Adapun pengujian yang dilakukan pada outer model untuk indikator reflektif meliputi:

1) *Convergent Validity*

Pengujian *Convergent Validity* merupakan nilai loading faktor yang terdapat pada variabel laten dengan indikator-indikatornya. Suatu indikator dikatakan mempunyai reabilitas yang baik apabila nilainya lebih besar dari 0,70. Kemudian apabila loading faktor dibawah 0,70 maka akan didrop dari model. (I. Ghozali, 2016)

2) *Discriminant Validity*

Pengujian *discriminant validity* adalah tingkat sejauh mana dari hasil pengukuran suatu konsep dapat membedakan diri dengan hasil pengukuran dari konsep lain secara teoritis harus berbeda, *discriminant validity* juga merupakan bagian dari outer model. Syarat untuk memenuhi *discriminant validity* yaitu indikator dikatakan valid apabila mempunyai *loading factor* tertinggi kepada konstruk yang dituju dibandingkan dengan *loading factor* kepada konstruk lain.

Salah satu metode yang digunakan untuk menguji validitas diskriminan adalah dengan membandingkan nilai *square root of Average Variance Extracted (AVE)* dari setiap konstruk dengan nilai korelasi antar konstruk dalam model.

Validitas diskriminan dinyatakan memadai apabila nilai akar kuadrat dari AVE untuk suatu konstruk lebih besar daripada nilai korelasi tertinggi konstruk tersebut dengan konstruk lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk tersebut memiliki kemampuan yang baik dalam membedakan dirinya dari konstruk lain dalam model.

3) *Composite Reliability*

Pengujian composite reliability bertujuan untuk mengevaluasi keandalan instrumen penelitian dengan mengukur tingkat konsistensi internal dari masing-masing konstruk. Nilai *composite reliability* yang baik ditunjukkan dengan angka di atas 0,70. Apabila seluruh konstruk laten dalam model memiliki nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha* $\geq 0,70$, maka dapat disimpulkan bahwa konstruk tersebut memiliki reliabilitas yang baik, sehingga kuesioner yang digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian dianggap andal dan konsisten.

3.6.3 Merancang Model Struktural (Inner Model)

Pada model struktural yang disebut sebagai bagian model dalam (*inner model*), semua variabel laten terhubung satu sama lain. Pada model struktural, variabel laten dibagi menjadi dua kategori yaitu variabel eksogen dan variabel endogen.

3.6.4 Pengujian Hipotesis

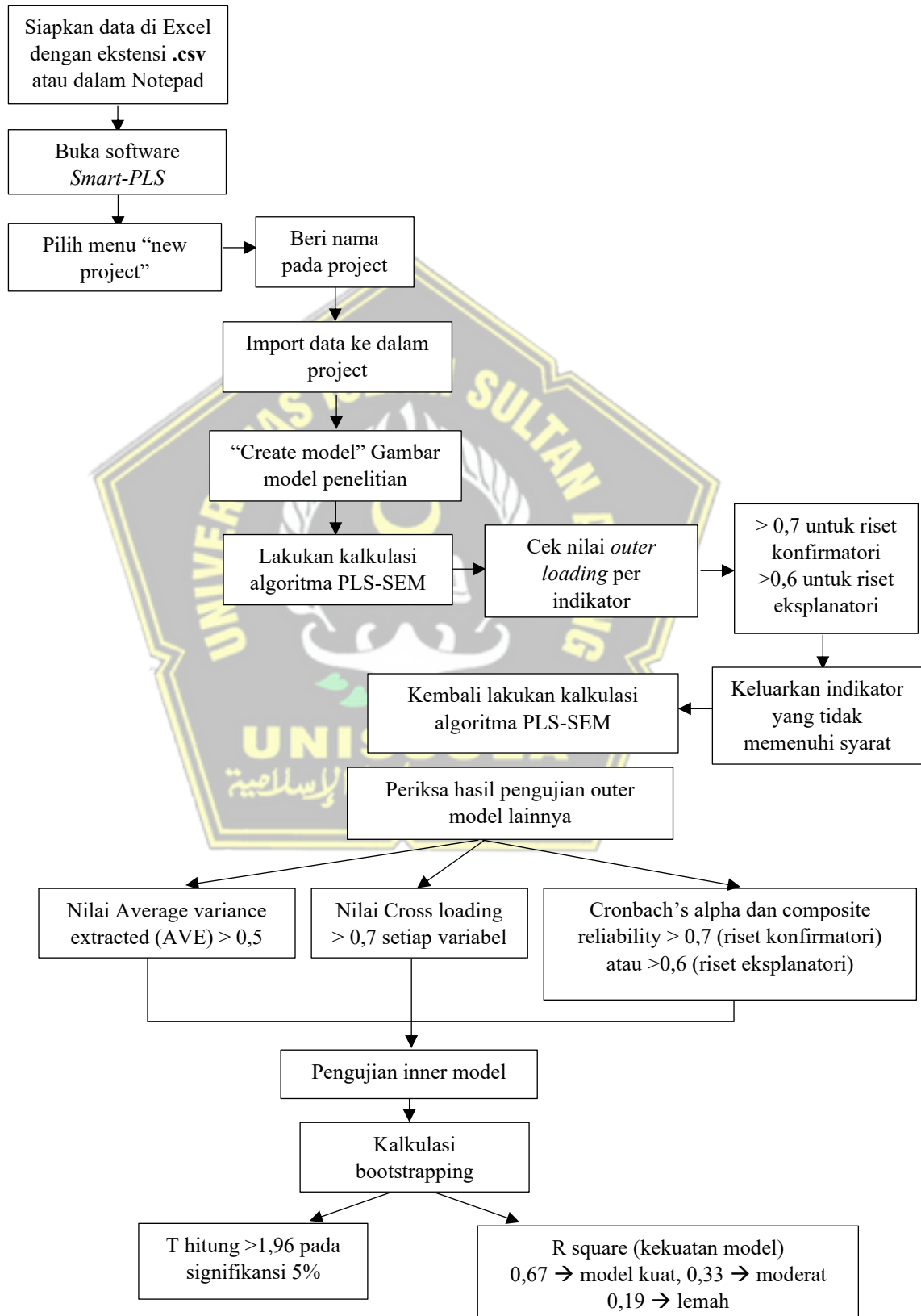
Untuk pengujian Hipotesis dilakukan dengan melihat nilai probabilitasnya dan t-statistiknya. Untuk pengujian hipotesis yang menggunakan nilai statistik maka untuk alpha 5% nilai t-statistik yang digunakan adalah 1,96. Sehingga kriteria penerimaan atau penolakan H_0 dapat ditentukan dengan kriteria uji “t” (I. Ghazali, 2016) sebagai berikut :

- (1) Nilai signifikansi $< 0,05$, maka H_a diterima
- (2) Nilai signifikansi $> 0,05$, maka H_a tidak diterima



3.6.5 Alur Analisis Data Menggunakan *SMART-PLS*

Gambar 3.1 Alur Analisis Data Menggunakan *SMART-PLS*



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Data yang digunakan adalah dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Kabupaten Bojonegoro. Analisis data pada penelitian ini menggunakan bantuan program pengolahan data Sem-PLS. Populasi pada penelitian ini adalah OPD pada Kabupaten Bojonegoro. Adapun metode pemilihan sampel ini menggunakan purposive sampling dengan kriteria yang ditentukan peneliti.

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan OPD Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 59 OPD di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner sebanyak 118 responden yang dilakukan menggunakan metode online yaitu melalui *link google form*. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka diperoleh data dari pengiriman dan pengolahan data kuesioner dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1 : Rincian Penyebaran Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebarkan	118	100%
Kuesioner yang kembali	112	94,91%
Kuesioner yang tidak kembali	6	5,08%
Kuesioner yang tidak dapat diolah	0	0%
Kuesioner yang dapat diolah	112	94,91%

Sumber : Data primer yang diolah

Jumlah data yang disebarluaskan sebanyak 118 kuesioner dan yang memberikan respon sebanyak 112 kuesioner atau 94,91%. Kuesioner yang tidak memberikan respon sejumlah 6 kuesioner atau 5,08%, hal tersebut disebabkan karena pegawai memiliki kesibukan dan saat pembagian kuesioner terdapat salah satu OPD yang mengalami pergantian bendahara, sehingga tidak memberikan respon terkait kuesioner yang telah diberikan. Data kuesioner yang dapat diolah sebesar 112 responden dengan berbagai gambaran, diantaranya jabatan, pendidikan terakhir jenis kelamin, dan lama bekerja. Berikut merupakan rincian hasil gambaran dari kuesioner dan dapat dilihat pada Tabel 4.2 hingga Tabel 4.5.

Tabel 4.2 : Jabatan

Keterangan	Jumlah	Persentase
Pejabat Penatausahaan Keuangan	55	49,10%
Bendahara Pengeluaran	57	50,90%
Jumlah	112	100%

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diperoleh data bahwa responden yang menempati jabatan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebanyak 55 orang atau 49,11%, sedangkan yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran sebanyak 57 orang dengan presentase sebesar 50,90%.

Tabel 4.3 : Jenis Kelamin

Keterangan	Jumlah	Persentase
Laki-laki	68	60,71%
Perempuan	57	39,29%
Jumlah	112	100%

Sumber : Data primer yang diolah

Data yang dihasilkan pada Tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa responden yang memiliki jenis kelamin perempuan sebanyak 57 orang atau sebesar 39,29%

dari 112 responden, sedangkan jenis kelamin laki-laki sejumlah 68 orang dari 112 responden atau sebesar 60,71% dari total presentase.

Tabel 4.4 : Pendidikan Terakhir

Keterangan	Jumlah	Persentase
SMA/SMK/MA	19	16,97%
Diploma III	5	4,46%
S1 / D IV	54	48,21%
S2 / S3	34	30,36%
Jumlah	112	100%

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa responden yang memiliki pendidikan terakhir SMA/SMK/MA sebesar 16,97% atau sebanyak 19 responden. Responden yang memiliki pendidikan Diploma III sebesar 4,46% atau sebanyak 5 responden. Responden yang memiliki pendidikan Diploma IV maupun S1 sebesar 48,21% atau sebanyak 54 responden. Informasi terkait pendidikan responden dianggap penting karena dengan mengetahui pendidikan responden dapat menilai Tingkat pemahaman responden.

Tabel 4.5 : Lama Bekerja

Keterangan	Jumlah	Persentase
1-5 Tahun	8	7,14%
5 Tahun - 10 Tahun	1	0,89%
10 Tahun- 15 Tahun	20	17,86%
>15 Tahun	83	74,11%
Jumlah	112	100%

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan Tabel 4.5 diketahui bahwa responden yang memiliki lama kerja satu hingga lima tahun sebanyak 8 responden atau 7,14%. Responden yang memiliki lama kerja lebih dari 5 tahun dan kurang dari 10 tahun hanya satu responden atau sebesar 0,89%. Responden yang memiliki lama kerja 10 hingga 15

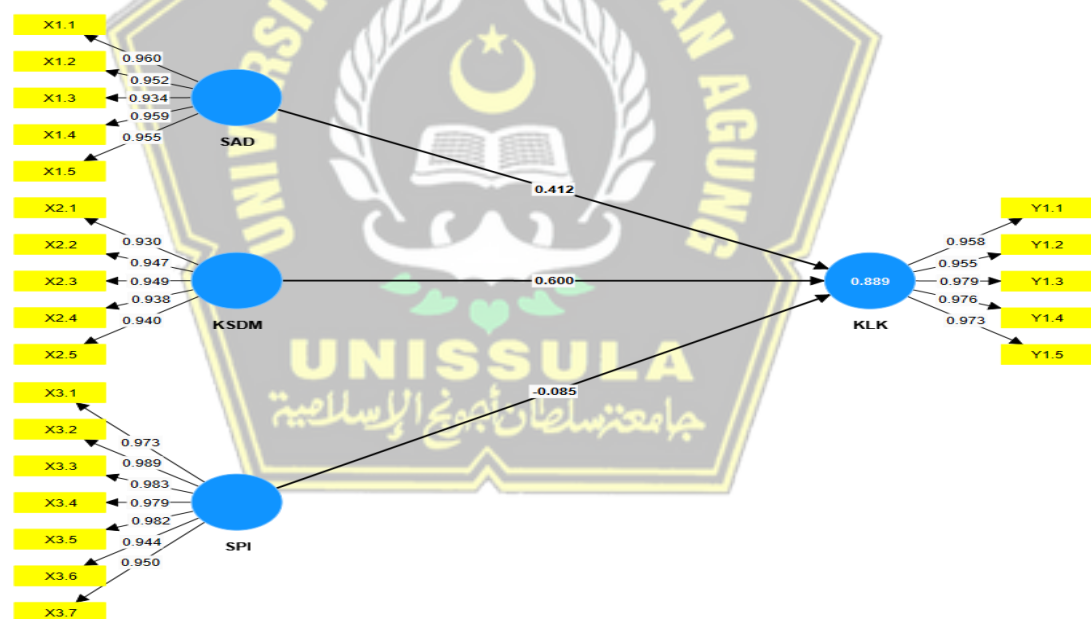
tahun sebanyak 20 responden atau sebesar 17,86%. Responden yang memiliki lama kerja lebih dari 15 tahun sebanyak 83 responden atau sebesar 74,11%. Informasi terkait pengalaman lama bekerja di OPD dapat menilai seberapa besar responden mengetahui keadaan OPD.

4.2 PENGUJIAN DAN HASIL ANALISIS DATA

4.2.1 Pengujian Pengukuran Model (*Outer Model*)

Analisis terhadap instrumen penelitian dilakukan melalui pengujian model pengukuran (*measurement model*), yang mencakup uji validitas dan uji reliabilitas. Hasil pengujian tersebut disajikan dan dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 4. 1 Model Struktural



Sumber: Data primer yang diolah

1. Uji Validitas Kovergen (*Outer Model*)

Pengujian validitas dilakukan untuk mengukur sejauh mana suatu instrumen penelitian mampu mengukur konstruk atau konsep yang dimaksud. Pengujian ini dilakukan guna memastikan bahwa setiap indikator dalam

instrumen benar-benar merepresentasikan variabel yang diteliti sesuai dengan landasan teori yang digunakan (Ghozali, 2014: 37).

Tabel 4.6 Validitas Konvergen

Konstruk dan Indikator	<i>Loading Factor</i>	AVE
Sistem Akuntansi Digital (SAD)		0.937
SAD1	0.960	
SAD3	0.952	
SAD3	0.934	
SAD4	0.959	
SAD5	0.955	
Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM)		0.885
KSDM1	0.930	
KSDM2	0.947	
KSDM3	0.949	
KSDM4	0.938	
KSDM5	0.940	
Pengendalian Internal (SPI)		0.906
SPI1	0.973	
SPI2	0.989	
SPI3	0.983	
SPI4	0.979	
SPI5	0.982	
SPI6	0.944	
SPI7	0.950	
Kualitas Laporan Keuangan (KLK)		0.944
KLK1	0.958	
KLK2	0.955	
KLK3	0.979	
KLK4	0.976	
KLK5	0.973	

Sumber: Data primer yang diolah

Hasil uji validitas terhadap variabel dalam penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh indikator telah memenuhi kriteria nilai outer loading, yaitu $>0,6$ atau $> 0,7$. Selain itu, nilai *Average Variance Extracted*

(*AVE*) untuk masing-masing konstruk juga berada $>0,50$, yang mengindikasikan bahwa setiap konstruk memiliki validitas konvergen yang memadai.

2. Validitas Diskriminan (*Outer Model*)

Batasan nilai *AVE* yang disarankan dalam sebuah penelitian eksploratori adalah lebih besar dari 0.5. Sedangkan untuk melihat validitas diskriminan, harus memuat prinsip bahwa manifest variabel yang berbeda harusnya tidak berkorelasi tinggi. Untuk melihat validitas diskriminan dapat melihat cross loading setiap variabel harus lebih dari 0.70. Selain cara tersebut dapat juga menggunakan rumus perbandingan akar kuadrat *AVE* dengan nilai korelasi antar konstruk dalam sebuah model. Tabel 4.7 menjelaskan mengenai validitas diskriminan.

Tabel 4.7
Uji Validitas Diskriminan

	KLK	KSDM	SAD	SPI
KLK	0.968			
KSDM	0.935	0.941		
SAD	0.921	0.949	0.952	
SPI	0.602	0.658	0.710	0.972

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan hasil uji validitas diskriminan yang disajikan pada Tabel 4.7, terlihat bahwa nilai akar kuadrat dari Average Variance Extracted (*AVE*) untuk masing-masing konstruk lebih besar dari nilai korelasi antar konstruk lainnya, serta seluruh nilai *AVE* melebihi 0,50. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap variabel laten dalam model memiliki validitas diskriminan yang baik dan mampu membedakan dirinya dari konstruk lainnya secara memadai.

KLK memiliki nilai 0,968, KSDM 0,941, SAD 0,952, dan SPI 0,972. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa masing-masing konstruk dapat dibedakan dengan jelas dari konstruk lainnya dalam model penelitian ini. Selain itu, hubungan antar konstruk juga menunjukkan validitas diskriminan yang baik, yang mengindikasikan bahwa variabel-variabel tersebut tidak saling tumpang tindih dan dapat diukur secara independen.

3. Uji Reliabilitas (*Outer Model*)

Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi dan stabilitas alat ukur dalam mengukur konstruk yang dimaksud. Reliabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa instrumen penelitian mampu menghasilkan data yang konsisten dalam berbagai kondisi pengukuran. Adapun hasil uji reliabilitas untuk masing-masing konstruk adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Uji Reliabilitas

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
KLK	0,983	0.983	0.987	0.937
KSDM	0,968	0.968	0.975	0.885
SAD	0,974	0.975	0.980	0.906
SPI	0,990	0.991	0.992	0.944

Sumber: Data primer yang diolah

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam model memiliki nilai *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha* di atas 0,70. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa instrumen pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria uji reliabilitas, yang berarti bahwa alat ukur tersebut konsisten dan andal dalam mengukur konstruk yang dimaksud.

4.2.2 Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Model struktural atau inner model merepresentasikan hubungan antara variabel laten yang dibangun berdasarkan teori substantif yang mendasari penelitian. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi model struktural adalah nilai R-Square (R^2), yang mencerminkan seberapa besar variabel laten independen mampu menjelaskan variabel laten dependen dalam model. Nilai R-Square yang tinggi menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh substantif terhadap variabel dependen (Ghozali, 2014). Pengujian model struktural dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SmartPLS versi 4. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai R-Square untuk masing-masing variabel dependen sebagai berikut:

Tabel 4.9 Nilai R-Square

	R Square	R Square Adjusted
KLK	0.889	0.886

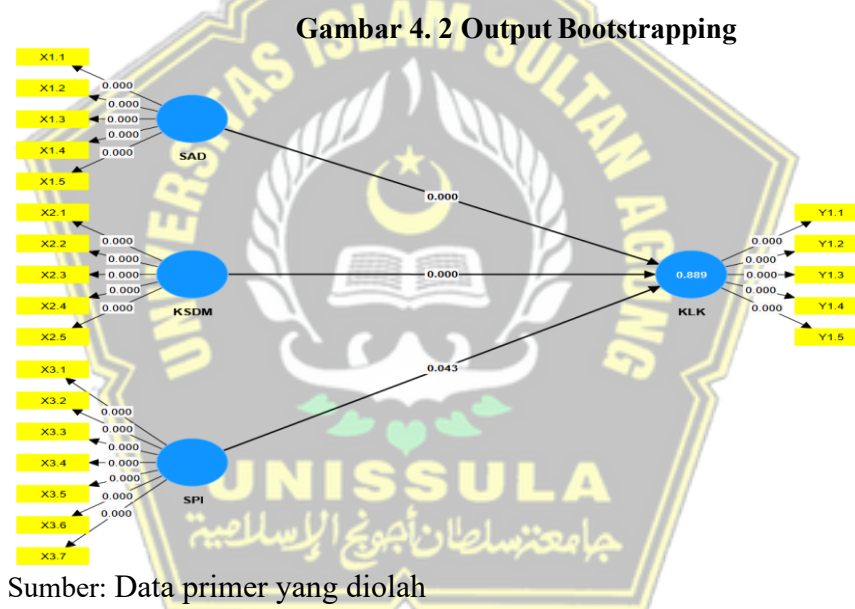
Sumber: Data primer yang diolah

Nilai R Square sebesar 0,889 menunjukkan bahwa sekitar 88,9% variabilitas dalam Kualitas Laporan Keuangan (KLK) dapat dijelaskan oleh variabel-variabel yang digunakan dalam model ini. Sedangkan R Square Adjusted yang bernilai 0,886 menunjukkan bahwa setelah mempertimbangkan jumlah variabel independen dalam model, 88,6% dari variasi KLK masih dapat dijelaskan, yang menunjukkan bahwa model ini cukup baik dalam menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dengan KLK.

4.2.3 Uji Hipotesis

Untuk menentukan apakah suatu hipotesis diterima atau ditolak, dapat dilihat dari nilai signifikansi antar konstruk, nilai T-statistik, dan P-values.

Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan melalui uji T untuk menguji pengaruh antar variabel. Uji T dilakukan dengan membandingkan nilai T-statistik dengan nilai T-tabel. Seluruh pengujian dilakukan dengan bantuan software SmartPLS (Partial Least Square) 4. Nilai-nilai T-statistik, P-value, dan koefisien beta diperoleh dari hasil bootstrapping yang dilakukan melalui SmartPLS. Adapun kriteria pengujian hipotesis (rules of thumb) dalam penelitian ini adalah: hipotesis diterima apabila nilai T-statistik $> 1,96$, nilai P-value $< 0,05$ (5%), dan koefisien beta bernilai positif.



Tabel 4.10 Uji Hipotesis

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
KSDM -> KLK	0,600	0,596	0,097	6,157	0,000
SAD -> KLK	0,412	0,416	0,106	3,900	0,000
SPI -> KLK	-0,085	-0,089	0,042	2,028	0,043

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan hasil analisis data diatas, pengaruh Kompetensi Sumber

Daya Manusia (KSDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (KLK) menunjukkan hubungan yang signifikan dengan nilai T Statistics sebesar 6,157 dan P-Value yang sangat rendah (0,000), yang menunjukkan bahwa KSDM memiliki pengaruh yang kuat terhadap KLK. Hal ini menunjukkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Selanjutnya, analisis hubungan antara Sistem Akuntansi Digital (SAD) dan Kualitas Laporan Keuangan (KLK) juga menunjukkan pengaruh yang signifikan dengan nilai T Statistics sebesar 3,900 dan P-Value sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi digital dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Selain itu juga menunjukkan sistem akuntansi digital berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Analisis hubungan antara Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Kualitas Laporan Keuangan (KLK) juga menunjukkan pengaruh yang signifikan dengan nilai T Statistics sebesar 2,028. Nilai koefisien negatif (-0,085) dan $p\text{-value} < 0,05$ mengindikasikan bahwa SPI berpengaruh signifikan, namun arah pengaruhnya tidak sesuai harapan. Ini bisa menjadi indikator bahwa penerapan SPI saat ini belum berjalan efektif, atau bahkan menjadi hambatan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan.

4.3 PENGUJIAN DAN HASIL ANALISIS DATA

4.3.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Digital terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil analisis, variabel Sistem Akuntansi Digital memiliki nilai t-statistic sebesar 3,900 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai

signifikansi tersebut lebih kecil dari batas yang ditentukan ($p < 0,05$) dan nilai t-statistic lebih besar dari nilai t-tabel ($3,900 > 1,96$), maka **hipotesis pertama (H1) dinyatakan diterima**. Selain itu, nilai koefisien jalur sebesar 0,412 menunjukkan bahwa pengaruh yang ditimbulkan bersifat positif dan signifikan.

Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan sistem akuntansi digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem akuntansi memberikan dampak positif terhadap efisiensi operasional, akurasi pencatatan, dan keandalan pelaporan transaksi keuangan. Dengan sistem yang terintegrasi dan terdokumentasi secara digital, laporan keuangan dapat dihasilkan secara lebih cepat, tepat waktu, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Hal ini juga mendukung proses audit eksternal oleh BPK, yang kemudian tercermin dalam pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Penelitian yang dilakukan oleh Tawaqal dan Suparno (2017) juga menggaris bawahi pentingnya penerapan sistem informasi akuntansi dalam lingkungan instansi pemerintahan. Mereka menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan transaksi keuangan. Tanpa penerapan sistem yang memadai, instansi pemerintahan berpotensi mengalami kesulitan dalam memproses transaksi secara akurat dan sistematis, yang pada akhirnya dapat menghambat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Sesuai dengan teori stewardship, pemerintah daerah berperan sebagai pengelola (steward) yang berkewajiban untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai upaya dalam mengelola serta menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, disajikan secara jujur, dan sesuai dengan standar yang berlaku sehingga dapat memberikan manfaat bagi pihak principal (Jelfri, 2018).

4.3.2 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia menunjukkan nilai T-statistik sebesar 6,157 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, dan nilai T-statistik melebihi nilai T-tabel ($6,157 > 1,96$). Selain itu, hasil analisis juga menunjukkan bahwa nilai koefisien jalur sebesar 0,600, yang mengindikasikan bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_2) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Dengan demikian, **hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini dinyatakan diterima.**

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia, khususnya dalam memahami prinsip-prinsip akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pemahaman terhadap struktur organisasi di instansi tempat bekerja, berkontribusi secara signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan yang andal dan relevan. Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian oleh Sumaryati, Novitasari, dan Machmudah (2020) yang menyatakan bahwa aparatur sipil negara perlu secara aktif mengembangkan

kompetensi melalui pelatihan dan peningkatan wawasan di bidang akuntansi, baik secara teoritis maupun praktis, termasuk penguasaan terhadap sistem manual maupun berbasis komputerisasi.

Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan Gasperz (2019) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di wilayah Maluku. Penelitian tersebut menekankan bahwa penguatan kompetensi dapat dicapai melalui program pendidikan dan pelatihan yang sistematis bagi para penyusun laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam menghasilkan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan sesuai standar.

Teori stewardship beranggapan bahwa individu dalam organisasi dalam hal ini aparatur pemerintah daerah memiliki niat dan motivasi yang selaras dengan tujuan organisasi, yaitu memberikan pelayanan publik yang baik dan akuntabel. Pegawai pemerintah sebagai steward atau pengelola bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik secara optimal dan melaporkannya secara transparan serta sesuai standar yang berlaku.

Semakin tinggi kompetensi seorang aparatur, baik dari sisi penguasaan teknis akuntansi, pemahaman terhadap regulasi pelaporan keuangan, maupun penguasaan sistem informasi akuntansi, maka akan semakin besar kemampuannya untuk menyusun laporan keuangan yang akurat, jujur, dan tepat waktu. Ini mencerminkan nilai-nilai dasar dari stewardship yaitu tanggung jawab, loyalitas, dan orientasi terhadap tujuan jangka panjang organisasi, bukan sekadar kepentingan pribadi.

Temuan ini juga memperkuat pandangan bahwa kompetensi pegawai bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga representasi dari komitmen moral dan profesionalisme dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan publik. Dengan demikian, kompetensi SDM yang tinggi mendukung prinsip-prinsip stewardship, yakni kejujuran dan integritas dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan.

4.3.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal (SPI) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (KLK) dengan arah hubungan negatif (koefisien = -0,085, t-statistic = 2,028, p-value = 0,043). Meskipun hipotesis (H3) diterima karena memenuhi signifikansi statistik ($p < 0,05$), arah negatif dari koefisien tersebut mengindikasikan bahwa penerapan SPI di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro saat ini belum mampu mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan secara optimal.

Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti pelaksanaan SPI belum dijalankan secara efektif masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek substansial dari pengendalian risiko dan kepatuhan, pelatihan dan pemahaman terhadap pengendalian internal masih rendah di kalangan OPD.

Dalam penelitiannya mengenai SPI pada instansi pemerintahan daerah, ditemukan bahwa SPI yang tidak dijalankan secara menyeluruh dan hanya bersifat formal tidak memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan temuan Anda bahwa SPI bisa

berdampak negatif bila tidak diimplementasikan dengan baik (Putri & Lestari, 2021)

Sari (2019), menemukan bahwa SPI tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan karena masih lemahnya pelaksanaan pengendalian, kurangnya monitoring, serta rendahnya kompetensi pelaksana SPI. Yuliana (2020), memberikan hasil bahwa SPI pengaruh negatif pada kualitas laporan keuangan, hal ini dapat terjadi ketika SPI bersifat terlalu birokratis, sehingga memperlambat proses penyusunan laporan dan menyebabkan ketidaktepatan waktu serta penurunan kualitas.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, hasil ini menjadi indikator penting bahwa meskipun struktur pengendalian telah dibentuk, efektivitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan. Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengendalian internal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa SPI benar-benar berfungsi sebagai sistem yang mendukung akuntabilitas dan peningkatan kualitas laporan keuangan.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Sistem Akuntansi Digital, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Sistem Akuntansi Digital berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah di Kabupaten Bojonegoro telah berjalan dengan baik dan efektif. Hal tersebut turut mendukung penyusunan laporan keuangan yang berkualitas, yang tercermin dari diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- b. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil ini mengindikasikan bahwa tingkat pengetahuan, keahlian, dan perilaku aparatur dalam proses penyusunan laporan keuangan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan tersebut. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki, semakin baik pula kemampuan dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal dan sesuai dengan standar yang berlaku.
- c. Sistem Pengendalian Internal menunjukkan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, meskipun masih diperlukan upaya penguatan lebih lanjut guna mengoptimalkan perannya dalam mendukung peningkatan

kualitas laporan keuangan secara menyeluruh.

5.2 KETERBATASAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya terletak pada data yang diperoleh melalui kuesioner, yang bersifat subjektif dan tertutup karena didasarkan pada persepsi responden. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat kepercayaan, pengalaman pribadi, serta persepsi individu terhadap topik yang diteliti, sehingga memungkinkan adanya bias dalam penilaian.

5.3 SARAN

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperoleh hasil yang lebih akurat dengan meningkatkan kualitas metodologi penelitian, khususnya melalui wawancara langsung terhadap responden. Pendekatan ini dinilai lebih mampu menggambarkan kondisi riil di lapangan serta memperkaya data yang diperoleh sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid dan mendalam.
- b. Penelitian selanjutnya juga perlu dapat menambah jumlah populasi dalam pengambilan sampel juga perlu dipertimbangkan terutama dengan melibatkan Kepala OPD sebagai Pengguna Anggaran agar diperoleh perspektif yang lebih representatif.
- c. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan memperluas variabel yang diteliti serta mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi kualitas laporan keuangan, seperti tingkat kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta implementasi prinsip-prinsip *Good Government Governance* (GGG), yang belum dikaji dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bestari, K. A., & Wahyuni, F. (2023). Determinan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 7(1), 163–184. <https://doi.org/10.18196/rabin.v7i1.16995>.
- BPK Provinsi Jawa Timur. (2023a). *BPK SERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023*. <https://jatim.bpk.go.id/siaran-pers/bpk-serahkan-laporan-hasil-pemeriksaan-atas-laporan-keuangan-pemerintah-daerah-provinsi-jawa-timur-tahun-2023/>.
- BPK Provinsi Jawa Timur. (2023b). *LKPD Kabupaten Bojonegoro 2023 – WTP*. <https://jatim.bpk.go.id/hasil-pemeriksaan/lhp-lkpd/lkpd-kabupaten-bojonegoro-tahun-2023-wtp/>.
- Donaldson, L., & J.H, D. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16(49–64).
- Dzahabiyah, R. K., & Ardini, L. (2023). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Bpkad Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(5), 1–21.
- Irwan, & Adam, K. (2015). *Metode Parial Least Square (PLS) dan Terapannya*.
- Hatmawan, A. A., & Riyanto, S. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif (Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen)*. Deepublish.
- Hidayat, Yusuf And Setiawan, Ade. (2023). *Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dimediasi Good Government Governance (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen)*. Skripsi Thesis, UIN Surakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. (n.d.). *Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (n.d.). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta.

- Rifandi, Z. W. (2019). Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa.
- Rosmalita, N., & Nadirsyah, N. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2), 239–248. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15559>
- Sahir, S. H. (2022a). *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.
- Sari, Tyas Kurnia. (2022). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Setyowati, L., Isthika, W., Pratiwi, R. D., & Nuswantoro, U. D. (2016). Faktor- faktor yang mempengaruhi kualitas laporan. *Kinerja Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 1, 179–192.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Halaman 140
- Sumaryati, Novitasari, & Machmuddah. (2020). Accounting Information System, Internal Control System, Human Resource Competency and Quality of Local Government Financial Statements in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(10), 795–802.
- Tawaqal, I., & Suparno. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 02(04), 125–135.
- Varista, Vira. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (SKPD Kab. Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
- Veny Mufidatus Saffanah, & Dwi Suhartini. (2024). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5), 4390 –. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1720> Sahir, S. H. (2022a). *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.